



# **EFISIENSI ANGGARAN DALAM EVALUASI PEMBANGUNAN: ANALISIS FUNGSI ORGANISASI BPKAD NTB, OPINI PUBLIK DI MEDIA SOSIAL X DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

**Yul Hadiansyah<sup>1,a,\*</sup>**

<sup>1</sup>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

a. \*Email: [yulhadiansyah@gmail.com](mailto:yulhadiansyah@gmail.com)

\*Correspondent Email: [yulhadiansyah@gmail.com](mailto:yulhadiansyah@gmail.com)

## **Article History:**

Received: 02-03-2025; Received in Revised: 24-03-2025; Accepted: 27-03-2025

DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/jemma.v8i1.3168>

## **Abstrak**

*Penelitian ini menganalisis efisiensi anggaran dalam pembangunan daerah dengan fokus pada kinerja Pemerintah Provinsi NTB, opini publik di media sosial X, dan formulasi kebijakan. Menggunakan metode campuran (kualitatif-kuantitatif) melalui analisis data keuangan, tinjauan literatur, dan pemantauan media sosial, penelitian mengungkap bahwa efisiensi anggaran menjadi faktor kritis dalam pembangunan NTB, terutama dalam kondisi keterbatasan transfer pusat. Temuan utama menunjukkan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan sinergi stakeholders dalam pengelolaan anggaran. Berdasarkan analisis skoring kebijakan oleh keyperson Pemerintah Provinsi NTB, dua rekomendasi utama yang muncul adalah: (1) Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Wilayah (skor 15) sebagai prioritas utama, dan (2) Penguatan PAD Berbasis Potensi Wilayah (skor 14) sebagai pendukung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kedua kebijakan tersebut dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas anggaran sekaligus mendukung visi NTB Makmur Mendunia.*

**Kata kunci:** akuntabilitas, efisiensi anggaran, keuangan daerah, NTB, transparansi

## **Abstract**

*This study analyzes budget efficiency in regional development with a focus on the performance of the NTB Provincial Government, public opinion on social media X, and policy formulation. Using a mixed-method approach (qualitative-quantitative) through financial data analysis, literature review, and social media monitoring, the research reveals that budget efficiency is a critical factor in NTB's development, particularly under conditions of limited central government transfers. Key findings indicate the need to enhance transparency, accountability, and stakeholder synergy in budget management. Based on policy scoring analysis by key persons in the NTB Provincial Government, two main recommendations emerge: (1) Region-Based Local Asset Management (score 15) as the top priority, and (2) Region-Specific Local Revenue Enhancement (score 14) as supporting strategy. The study concludes that implementing these two policies can serve as strategic solutions to improve budget effectiveness while supporting the vision of a Prosperous and Global NTB.*

**Keywords:** accountability, budget efficiency, local finance, NTB, transparency.

## **1. Pendahuluan**

Pembangunan daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, anggaran daerah memegang peranan krusial sebagai instrumen utama dalam mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan. Namun, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sering kali menjadi tantangan besar, terutama dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pengelolaan anggaran menjadi hal yang tidak dapat diabaikan dan menjadi salah satu kebijakan Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kerangka pengaturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien (Tahirs, 2020).

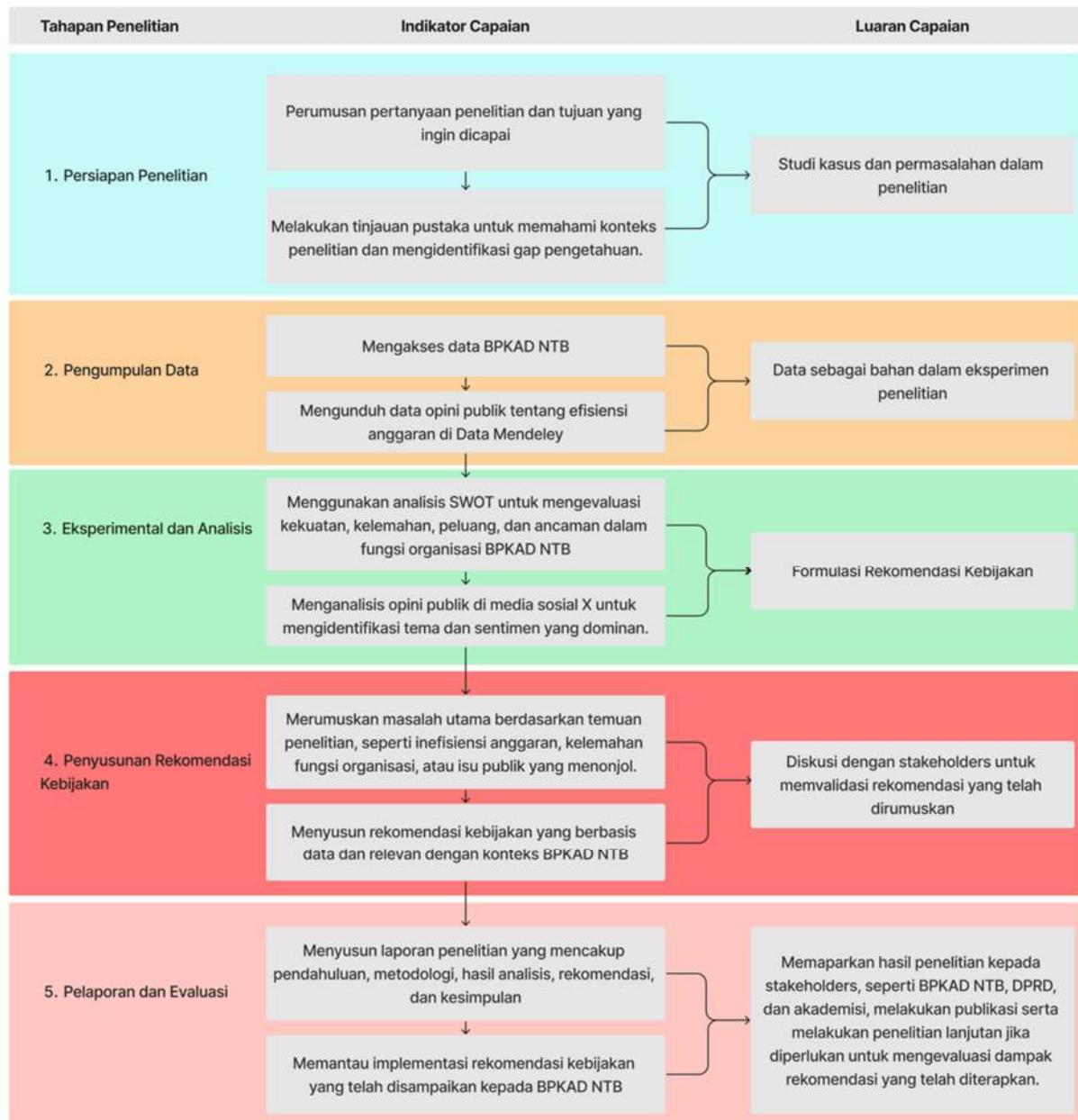
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup lingkup anggaran, perpendaharaan, akuntansi, dan pelaporan dalam urusan pemerintahan daerah (Nasution & M.Si, 2021). BPKAD NTB sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efisien dan efektif. Fungsi organisasi BPKAD NTB dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran perlu dievaluasi untuk mengidentifikasi potensi ineffisiensi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebuah lembaga yang terbentuk dari penggabungan Bagian Perlengkapan di Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB dengan bekas Biro Keuangan Setda Provinsi NTB (Nurcahya Avianty et al., 2020).

Di era digital seperti saat ini, opini publik yang berkembang di media sosial khususnya platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) (Azzawagama Firdaus et al., 2024)(Firdaus et al., 2023b)(Firdaus et al., 2024) menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah. Media sosial tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik, tetapi juga menjadi sumber data yang kaya untuk memahami persepsi publik (Firdaus et al., 2023a) terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Analisis terhadap opini publik di media sosial X dapat memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang efisiensi anggaran dan pembangunan yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi NTB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi anggaran di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dalam evaluasi pembangunan dengan fokus pada fungsi organisasi BPKAD Provinsi NTB, opini publik di media sosial X, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Dengan menggabungkan analisis kinerja organisasi, persepsi publik, dan rekomendasi kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah di NTB.

## 2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif pengambilan data dan mendapatkan analisis yang komprehensif seperti telah digunakan pada beberapa penelitian lainnya. (Vercasson et al., 2025), (Austin et al., 2023), (Bohorquez et al., 2024), (Monteiro-Alves et al., 2024), (Verlicchi et al., 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memahami fungsi organisasi BPKAD Provinsi NTB dan merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dari BPKAD Provinsi NTB dan opini publik dari sosial media X.

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan seperti ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Gambar 1 menunjukkan tahapan sistematis dalam melakukan penelitian tentang efisiensi anggaran dan evaluasi pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB dengan fokus pada

fungsi organisasi BPKAD Provinsi NTB serta opini publik di media sosial X. Tahapan dimulai dari persiapan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian serta melakukan tinjauan pustaka untuk memahami konteks dan mengidentifikasi gap pengetahuan. Selanjutnya, tahap pengumpulan data melibatkan pengambilan data dari BPKAD Provinsi NTB untuk kebijakan efisiensi anggaran pada setiap OPD. Data lainnya yang diakses adalah opini publik di media sosial X yang diunduh dari platform open access Data Mendeley dengan url: <https://data.mendeley.com/datasets/25dhk4dn3r/1> seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Data tersebut merupakan data primer yang diakses pada Februari 2025 dan dalam bentuk file csv.

[Back to dataset](#)

conversation_id_str	created_at	favorite_count	full_text
1888000446121525667	Fri Feb 07 23:02:38 +0000 2025	2	Aku sih gak sepenuhnya yakin bahwa efisiensi dgn pangkas anggaran Ky
1887849216204251296	Fri Feb 07 23:00:23 +0000 2025	0	@gumpnhell Ternyata efisiensi anggaran cuma buat umbi-umbian
1887999107966583199	Fri Feb 07 22:57:19 +0000 2025	0	Sikap Periset Soal Efisiensi Anggaran: Kembalikan Marwah BRIN <a href="https://t.co/yCpRvI">https://t.co/yCpRvI</a>
188786847130606739	Fri Feb 07 22:57:02 +0000 2025	1	@prabu_yudianto Efisiensi anggaran hanya membuat dana is berkurang sedikit mas
1887998192538763496	Fri Feb 07 22:53:41 +0000 2025	0	Pak @prabowo katanya perlu efisiensi anggaran bukankah kerja yg menyangkut li
1887530473682800762	Fri Feb 07 22:51:28 +0000 2025	1	@blackjasmineee @workfess Btw anggaran efisiensi itu ga sama dengan anggaran
1887986136603312516	Fri Feb 07 22:41:32 +0000 2025	1	@susipudijastuti Efisiensi & program yang memprioritaskan kebutuhan rakyat i
1887402011714375752	Fri Feb 07 22:39:34 +0000 2025	0	@nabiyalarifa dari semua efisiensi anggaran k/l aku paling bingung sama yang ini ke
1887977424195043602	Fri Feb 07 22:31:33 +0000 2025	0	@Arezeehere tahun ini katanya masih simpang siur pengadaan cpns soale efisiensi a
1887992520505966801	Fri Feb 07 22:31:08 +0000 2025	1	Banyak dulu yang menolak menyarankan supaya IKN ditunda dulu janji ekonomi me
1887651418846466365	Fri Feb 07 22:27:20 +0000 2025	0	@mas_veel Halah pret mas... Negara sedang ga baik2 saja. Anggaran kesehatan di si
1887883476881297428	Fri Feb 07 22:22:42 +0000 2025	0	@uyoktweet @ohoxnya2 Efisiensi anggaran dilakukan masif oleh PS tapi tidak untu
1887984462660591789	Fri Feb 07 22:15:33 +0000 2025	0	@DuncanCastles @Transfersdotcom @TransfersCast @ManUtd @LCFC @Emirate:
1887984745369276544	Fri Feb 07 22:11:17 +0000 2025	0	@theflankerID efisiensi anggaran mas makannya var ditiadakan
1887986567245099165	Fri Feb 07 22:10:08 +0000 2025	0	@utdfocusid efisiensi anggaran prabowo
1887986439536955560	Fri Feb 07 22:06:58 +0000 2025	1	sepupu gw literally batal nikah karena efek dari efisiensi anggaran karena pendapatan
1887094128271411776	Fri Feb 07 22:04:16 +0000 2025	0	Salin efisiensi anggaran nanti dibuat isian awal tesis caraburuanare VIII /Danda mri

< 1 OF 1 FILES >

FILE INFORMATION

Budget efficiency in Indonesia, February 2025.csv

File extension: csv  
File size: 2.76 MB  
Uploaded: 23 Feb 2025  
Licence: CC BY 4.0  
SHA-256 checksum: 7547eac8985feb7c1bf8a1add0cb8543663587c99323b7e216ff739743d91a6c  
[Download file](#)

Gambar 2. Data Opini Publik tentang Efisiensi Anggaran

Data ini diperoleh dari media sosial X yang membahas topik efisiensi anggaran, diakses pada bulan Februari 2025. Sebelum diunggah, data opini publik ini telah melalui proses penyaringan dengan mempertimbangkan kebijakan privasi pengguna dan etika penelitian. Data ini merupakan data primer yang masih mentah (belum diolah) dan menggunakan bahasa Indonesia, dengan jumlah lebih dari sepuluh ribu data. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan API media sosial X dan bahasa pemrograman Python.

Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode SWOT seperti banyak penelitian yang telah menggunakan metode ini (Khosravani et al., 2025), (Chopra et al., 2025), (Waheed et al., 2025), (Kumar et al., 2025), (Tüzün et al., 2025) dalam menganalisis permasalahan. Penelitian ini kemudian akan mengevaluasi fungsi organisasi dan analisis sentimen untuk memahami persepsi publik.

Setelah data dianalisis, tahap penyusunan rekomendasi kebijakan dilakukan dengan merumuskan masalah utama dan menyusun rekomendasi berbasis data yang relevan dengan

konteks fungsi BPKAD Provinsi NTB dalam mengawal efisiensi anggaran di Pemerintah Provinsi NTB. Tahap terakhir adalah pelaporan dan evaluasi, di mana laporan penelitian disusun dan rekomendasi dipresentasikan kepada stakeholders untuk validasi. Proses ini juga mencakup pemantauan implementasi rekomendasi dan publikasi hasil penelitian, serta penelitian lanjutan jika diperlukan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### A. Analisis Postur APBN 2025 dalam Rencana Keuangan Daerah NTB

Postur APBN 2025 menunjukkan defisit anggaran yang besar sehingga harus ditutup melalui pemberian, terutama dari utang. Hal ini menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan efisiensi anggaran guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan.

POSTUR APBN TAHUN ANGGARAN 2025 (Miliar Rupiah)		
URAIAN	RAPBN	APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>2.996.870,2</b>	<b>3.005.127,7</b>
I. Penerimaan Perpajakan	2.490.911,6	2.490.911,6
1. Penerimaan Pajak	<b>2.189.307,2</b>	<b>2.189.307,2</b>
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai	301.604,4	301.604,4
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	<b>505.377,6</b>	<b>513.635,1</b>
III. Penerimaan Hibah	581,1	581,1
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>3.613.056,3</b>	<b>3.621.313,7</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.693.184,2	2.701.441,6
1. Belanja K/L	<b>976.788,0</b>	1.160.085,0
2. Belanja non-K/L	1.716.396,2	1.541.356,6
II. Transfer ke Daerah	<b>919.872,1</b>	919.872,1
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(63.331,8)	(63.331,8)
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	<b>(616.186,1)</b>	(616.186,1)
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,53)	(2,53)
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>616.186,1</b>	<b>616.186,1</b>
I. Pembiayaan Utang	775.867,5	775.867,5
II. Pembiayaan Investasi	(154.501,3)	(154.501,3)
III. Pemberian Pinjaman	(5.442,1)	(5.442,1)
IV. Kewajiban Penjaminan	-	-
V. Pembiayaan Lainnya	262,0	262,0

Gambar 3. Postur APBN Tahun Anggaran 2025

Gambar 3 menunjukkan Postur APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran 2025 dalam satuan miliar rupiah, yang membandingkan antara RAPBN (Rancangan APBN) dan APBN yang telah disetujui. Total pendapatan negara pada RAPBN adalah 2.996.870,2 miliar rupiah, sedangkan pada APBN yang disetujui meningkat menjadi 3.005.127,7 miliar rupiah. Pendapatan negara ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Penerimaan Perpajakan sebesar 2.490.911,6 miliar rupiah (termasuk penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat dari 505.377,6 miliar rupiah (RAPBN) menjadi 513.635,1 miliar rupiah (APBN), dan Penerimaan Hibah yang tetap stabil di 581,1 miliar rupiah.

Di sisi belanja, total belanja negara pada RAPBN adalah 3.613.056,3 miliar rupiah, sedangkan pada APBN yang disetujui meningkat menjadi 3.621.313,7 miliar rupiah. Belanja negara terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat dari 2.693.184,2 miliar rupiah (RAPBN) menjadi 2.701.441,6 miliar rupiah (APBN), dan Transfer

ke Daerah yang tetap stabil di 919.872,1 miliar rupiah. Belanja Pemerintah Pusat mencakup belanja K/L (Kementerian/Lembaga) dan non-K/L.

Selain itu, gambar ini juga menunjukkan Keseimbangan Primer yang mengalami defisit sebesar 63.331,8 miliar rupiah, baik pada RAPBN maupun APBN. Defisit Anggaran tetap sebesar 616.186,1 miliar rupiah, dengan persentase defisit terhadap PDB sebesar 2,53%. Untuk menutup defisit ini, pemerintah melakukan Pembiayaan Anggaran sebesar 616.186,1 miliar rupiah, yang terdiri dari Pembiayaan Utang sebesar 775.867,5 miliar rupiah, Pembiayaan Investasi yang defisit sebesar 154.501,3 miliar rupiah, Pemberian Pinjaman yang defisit sebesar 5.442,1 miliar rupiah, dan Pembiayaan Lainnya sebesar 262,0 miliar rupiah.

Pengaruh efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat terlihat dari upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, terutama dalam belanja K/L dan non-K/L. Meskipun belanja pemerintah pusat meningkat, hal ini diharapkan dapat diimbangi dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Efisiensi anggaran menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan dampak maksimal bagi masyarakat, terutama dalam konteks defisit anggaran yang harus ditutup melalui pembiayaan utang. Dengan meningkatkan efisiensi, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada utang dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, APBN 2025 menunjukkan defisit yang ditutup melalui pembiayaan, terutama dari utang, dengan adanya penyesuaian dalam pendapatan dan belanja untuk memenuhi kebutuhan fiskal tahun 2025, sambil terus mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah melakukan upaya efisiensi anggaran di awal tahun anggaran 2025 ini melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Efisiensi OPD NTB

No	SKPD	Efisiensi
1	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.027.182.138
2	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	15.973.331.012
3	1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.315.589.590
4	1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Permukiman	4.328.943.700
5	1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja	641.225.360
6	1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	521.715.350
7	1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial	7.529.947.966
8	2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	818.908.000
9	2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.667.193.300
10	2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan	343.100.000
11	2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.259.104.045
12	2.12.2.13.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.527.452.555
13	2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan	250.696.095

No	SKPD	Efisiensi
14	2.16.2.20.2.21.04.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.127.260.920
15	2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	439.949.450
16	2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.046.207.550
17	2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga	954.509.195
18	2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	718.858.600
19	3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan	3.121.402.920
20	3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata	1.860.407.225
21	3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.715.131.437
22	3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.408.007.558
23	3.29.0.00.0.00.01.0000 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.570.256.395
24	3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan	912.945.538
25	3.31.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian	987.098.300
26	4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	477.255.360
27	4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah	5.808.434.328
28	4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.847.608.438
29	5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.078.167.460
30	5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.809.202.099
31	5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.547.410.165
32	5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah	1.366.947.995
33	5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.174.008.085
34	5.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.682.634.050
35	5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Daerah	2.216.138.071
36	6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat	3.516.382.700
37	8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	617.457.215
<b>Grand Total</b>		<b>101.208.070.164</b>

Tabel 1 menampilkan nilai efisiensi anggaran yang dicapai oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Efisiensi anggaran mengacu pada kemampuan OPD untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dialokasikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan dengan biaya yang lebih rendah atau hasil yang lebih maksimal. Total efisiensi yang dicapai oleh seluruh OPD NTB adalah Rp. 101.208.070.164, yang menunjukkan upaya serius dalam pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat beberapa OPD yang mengalami nilai efisiensi anggaran tertinggi, seperti:

1. Dinas Kesehatan (Nilai Efisiensi: Rp. 15.973.331.012)
2. Dinas Kesehatan mencatat nilai efisiensi tertinggi, menunjukkan upaya optimalisasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini dapat mencakup penghematan dalam pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, atau efisiensi operasional di fasilitas kesehatan.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Nilai Efisiensi: Rp. 8.027.182.138)
4. Efisiensi ini mencerminkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dengan penggunaan anggaran yang lebih efektif, seperti penghematan dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan atau program pelatihan guru.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) (Nilai Efisiensi: Rp. 5.809.202.099)
6. BPKAD memegang peran krusial dalam mengelola keuangan daerah. Efisiensi yang dicapai menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan aset daerah.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Nilai Efisiensi: Rp. 3.315.589.590)
8. Analisis: Efisiensi ini dapat berasal dari penghematan dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau penataan ruang wilayah.
9. Dinas Sosial (Nilai Efisiensi: Rp. 7.529.947.966)
10. Analisis: Dinas Sosial berhasil mengoptimalkan anggaran untuk program-program bantuan sosial, seperti bantuan tunai atau program penanggulangan kemiskinan.

## B. Analisis Sentimen Opini Publik



Gambar 4. Wordcloud Data Opini Publik

Gambar 4 menampilkan kata-kata yang paling sering muncul dalam dataset yang dianalisis. Kata-kata yang dominan, seperti "efisiensi", "anggaran", "makan bergizi", dan "grati" (kemungkinan singkatan dari "gratis"), menunjukkan bahwa diskusi dalam teks banyak berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah, terutama dalam konteks program makanan

bergizi gratis. Selain itu, munculnya kata "prabowo subianto", "pemerintah", dan "dpr ri" mengindikasikan adanya pembahasan terkait kebijakan politik dan tokoh yang berperan dalam isu ini. Tema utama yang dapat disimpulkan dari word cloud ini adalah efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap kebijakan publik, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Kemungkinan, diskusi yang muncul mencakup pemotongan anggaran, kebijakan sosial, serta peran pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Untuk memahami lebih dalam, analisis lebih lanjut dapat dilakukan melalui sentimen analisis atau analisis topik, guna mengetahui bagaimana opini publik terbentuk terhadap isu ini.

#### 1. Strengths (Kekuatan)

- a. Kesadaran Publik: Kata-kata seperti *efisiensi anggaran* dan *anggaran untuk rakyat* menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah semakin menyadari pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- b. Fokus pada Program Prioritas : Frasa seperti *program makan bergizi gratis* dan *pembangunan bangsa* menunjukkan bahwa ada perhatian terhadap program sosial yang strategis.
- c. Dukungan Pemerintah : Nama tokoh seperti *Prabowo* dan *Sri Mulyani* Mengindikasikan adanya perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran.

#### 2. Weaknesses (Kelemahan)

- a. Tantangan Implementasi: Frasa seperti *anggaran dipotong* dan *dampak efisiensi* menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sering kali menghadapi hambatan dalam pelaksanaan, termasuk pemotongan anggaran yang mungkin tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Birokrasi yang Kompleks: Tidak ada referensi langsung, tetapi dalam konteks kebijakan publik, sering kali birokrasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan efisiensi anggaran.
- c. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Meskipun ada pembahasan tentang efisiensi, tidak ada indikasi kuat terkait mekanisme pengawasan dan transparansi anggaran.

#### 3. Opportunities (Peluang)

- a. Peningkatan Program Sosial: Adanya fokus pada *makan bergizi gratis* dan *pelayanan publik* bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan anggaran yang lebih efisien.
- b. Transformasi Digital dalam Keuangan Publik: Penguanan sistem digitalisasi dalam pengelolaan anggaran bisa meningkatkan transparansi dan efektivitas alokasi dana.
- c. Kolaborasi dengan Sektor Swasta dan Akademisi: Dengan melibatkan berbagai pihak, efisiensi anggaran dapat lebih terukur dan berbasis bukti.

#### 4. Threats (Ancaman)

- a. Resistensi dari Pihak yang Diuntungkan oleh efisiensi: Pengurangan anggaran atau restrukturisasi kebijakan sering kali mendapat tantangan dari pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem yang kurang efisien.
- b. Ketidakstabilan Ekonomi dan Politik: Perubahan kebijakan atau kondisi makroekonomi bisa mempengaruhi implementasi efisiensi anggaran.

- c. Kurangnya Kesadaran akan Prioritas: Jika efisiensi hanya diartikan sebagai pemotongan anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, maka bisa terjadi kontraproduktivitas.

### C. Penyelarasan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih & Implikasinya terhadap Rencana Keuangan Daerah

#### 1. Visi: NTB Makmur Mendunia

Visi ini mencerminkan cita-cita untuk menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai provinsi kepulauan yang makmur dan diakui di tingkat global. Visi ini terdiri dari tiga elemen utama:

- a. Provinsi Kepulauan: NTB yang terdiri dari Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan 402 pulau kecil (gili) memiliki potensi besar sebagai daerah agro-maritim yang tangguh dan penyangga ketahanan pangan nasional.
- b. NTB Makmur: Kondisi ideal di mana kemiskinan ditekan, ketimpangan sosial berkurang, pendapatan per kapita meningkat, pendidikan merata, kesehatan terjamin, dan kesempatan kerja terbuka.
- c. NTB Mendunia: Semangat pembangunan NTB yang memenuhi standar dunia, terutama dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, serta menjadi kawasan pertumbuhan kelas dunia yang menarik investasi berkelanjutan.

#### 2. Misi

- a. Membangun manusia yang berkarakter unggul, produktif, dan kompetitif.
- b. Memperkuat ekonomi daerah melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan pendapatan per kapita masyarakat sebagai pondasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
- c. Membangun ekosistem industri komoditas unggulan di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menuju industri agro-maritim yang berkelanjutan.
- d. Membangun sektor pariwisata berkualitas, industri kreatif, serta seni budaya daerah dan prestasi olahraga.
- e. Memperkuat sistem mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, dan investasi berkelanjutan.
- f. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah serta penegakan tata ruang yang berkelanjutan.
- g. Mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

#### 3. Program Unggulan

- a. NTB Sehat dan Cerdas: Fokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.
- b. Desa Berdaya: Pemberdayaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik: Transformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- d. Membangun Ekosistem Industri: Pengembangan industri berbasis komoditas unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

- e. Wisata MICE+S dan Wisata Halal: Pengembangan pariwisata berbasis MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), sport tourism, dan wisata halal.
  - f. E-Mania (Ekraf Makmur Mendunia): Pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - g. NTB Trampil dan Tangkas: Program pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.
  - h. NTB Lestari Berkelanjutan: Pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
  - i. NTB Inklusif: Program yang memastikan pembangunan merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
  - j. Infrastruktur Mantap: Pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
4. Berdasarkan visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih, diberikan implikasi dan dampak yang akan terjadi dari sektor keuangan dan perencanaan program di NTB. Realisasi program unggulan Gubernur terpilih NTB akan menghadapi tantangan signifikan, terutama dari segi keuangan daerah. Pemangkasan anggaran akan mengurangi alokasi dana untuk program-program strategis seperti Wisata MICE+S, E-Mania (Ekraf Makmur Mendunia), dan pengembangan sektor agro-maritim. Hal ini berimplikasi pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, penurunan kualitas pelayanan publik, dan lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi keuangan daerah, Pemerintah Provinsi NTB akan menghadapi tekanan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Implikasi keuangan yang mungkin terjadi antara lain:

- a. Pengurangan Skala Program: Pemerintah Provinsi NTB mungkin harus mengurangi skala program atau menunda proyek-proyek yang tidak prioritas, seperti pembangunan infrastruktur non-strategis atau program pelatihan yang kurang mendesak.
- b. Peningkatan Ketergantungan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pemerintah Provinsi NTB perlu meningkatkan upaya untuk mengoptimalkan PAD melalui peningkatan pajak daerah, retribusi, dan pengelolaan aset daerah. Namun, hal ini memerlukan waktu dan strategi yang matang.
- c. Restrukturisasi Anggaran: Pemerintah Provinsi NTB harus melakukan realokasi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
- d. Efisiensi Operasional: Pemerintah Provinsi NTB perlu menerapkan langkah-langkah efisiensi operasional, seperti mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Dampak dari pemangkasan anggaran ini adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, menurunnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya ketimpangan sosial. Pemerintah Provinsi NTB harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas secara optimal. Kolaborasi dengan stakeholders, termasuk pemerintah pusat,

swasta, dan masyarakat, menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan sesuai dengan visi NTB Makmur Mendunia.

#### D. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan pemaparan tersebut, ada tujuh alternatif kebijakan yang diberikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wilayah  
Menerapkan pendekatan kewilayahan dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah (Lombok dan Sumbawa). Hal tersebut dapat diimplementasikan berupa alokasi anggaran yang lebih spesifik berdasarkan potensi dan kebutuhan wilayah, seperti pengembangan pariwisata di Lombok dan agro-maritim di Sumbawa.
2. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berbasis Potensi Wilayah  
Mengoptimalkan PAD dengan memanfaatkan potensi ekonomi unggulan di setiap wilayah. Fokus pada pengembangan pariwisata dengan meningkatkan retribusi objek wisata dan mempromosikan destinasi baru adalah hal yang bisa dilakukan di wilayah Lombok. Sedangkan di wilayah Sumbawa, dapat mengembangkan sektor agro-maritim dengan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan, serta menarik investasi di sektor ini.
3. Efisiensi Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Strategis  
Memrioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah. Hal tersebut berupa infrastruktur transportasi yang menghubungkan Lombok dan Sumbawa, seperti pelabuhan dan bandara, mengembangkan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata di kedua wilayah dan memastikan bahwa proyek infrastruktur dilaksanakan secara transparan dan efisien.
4. Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Wilayah  
Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dengan memanfaatkan potensi masing-masing wilayah. Seperti memanfaatkan aset daerah untuk pengembangan pariwisata, seperti pembangunan fasilitas wisata dan pengelolaan objek wisata yang ada di Lombok. Dan mengoptimalkan aset daerah untuk pengembangan agro-maritim, seperti lahan pertanian dan perikanan. Serta menerapkan sistem inventarisasi aset yang terintegrasi untuk memastikan pengelolaan yang efektif.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur di Tingkat Wilayah  
Meningkatkan kapasitas aparatur di tingkat kabupaten/kota untuk mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah. Implementasinya berupa pelatihan dan pendampingan bagi aparatur di kabupaten/kota terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu juga dapat menerapkan sistem meritokrasi dalam promosi dan penempatan jabatan untuk meningkatkan kinerja aparatur di tingkat wilayah yang sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
6. Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan di Setiap Wilayah  
Memastikan bahwa program-program pembangunan di setiap wilayah berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Seperti mengalokasikan anggaran untuk

program mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan adaptasi perubahan iklim di setiap wilayah. Selain itu, juga dapat mendorong proyek-proyek yang ramah lingkungan dan mendukung ekonomi hijau di Lombok dan Sumbawa.

#### 7. Inovasi Kebijakan Fiskal Berbasis Wilayah

Mengembangkan kebijakan fiskal yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di setiap wilayah. Seperti menerapkan sistem insentif dan disinsentif untuk mendorong efisiensi dan kinerja OPD di tingkat kabupaten/kota. Selain hal tersebut, dapat juga mengembangkan skema pembiayaan berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara optimal di setiap wilayah.

### E. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan alternatif kebijakan yang dituangkan pada poin (D), dapat dianalisis prioritas kebijakan yang dilakukan menggunakan penilaian skor 1-5 oleh keyperson di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek seperti efektifitas, efisiensi serta dampak jangka panjang yang akan dilakukan. Perhitungan alternatif kebijakan tersebut seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Skoring Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor
<b>Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Wilayah</b>	2	4	2	8
<b>Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berbasis Potensi Wilayah</b>	5	5	4	14
<b>Efisiensi Alokasi Anggaran untuk Infrastruktur Strategis</b>	3	3	3	9
<b>Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Wilayah</b>	5	5	5	15
<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur di Tingkat Wilayah</b>	3	2	3	8
<b>Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan di Setiap Wilayah</b>	4	2	2	8
<b>Inovasi Kebijakan Fiskal Berbasis Wilayah</b>	3	3	2	8

Tabel 2 menunjukkan skoring alternatif 7 alternatif kebijakan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan jumlah skor, Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Wilayah mendapatkan nilai tertinggi 15 dikarenakan cukup rasional untuk diimplementasikan dibanding alternatif kebijakan lainnya. Selain hal tersebut, poin ini juga tepat sasaran dengan

memanfaatkan pengelolaan tiap aset berbasis kewilayahan yang ada di NTB. Selain alternatif tersebut, Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis Potensi Wilayah juga hampir mendapat skor sempurna yaitu 14. Hal ini mengungkapkan bahwa potensi penguatan PAD menjadi salah satu indikator yang cukup rasional dapat dilakukan dan menjadi rekomendasi kebijakan terhadap permasalahan yang ada. Sehingga rekomendasi kebijakan pertama yang diusulkan adalah Pengelolaan Aset Daerah berbasis Wilayah dan rekomendasi kebijakan pendukungnya adalah Penguatan PAD berbasis Potensi Wilayah.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh analisis dan diskusi dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan daerah, terutama dalam konteks keterbatasan anggaran dan pemangkasan transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi NTB telah menunjukkan upaya dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran, seperti terlihat dari nilai efisiensi yang dicapai oleh berbagai OPD. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada transfer pusat dan kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu diatasi. Rencana keuangan Pemerintah Provinsi NTB harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program strategis yang sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia, seperti pengembangan pariwisata, agro-maritim, dan ekonomi kreatif, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

BPKAD Provinsi NTB sebagai perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang melaksanakan urusan penunjang di bidang keuangan, memegang peran sentral dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung pembangunan yang efektif, Pemerintah Provinsi NTB perlu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penguatan kapasitas SDM aparatur dan pemanfaatan teknologi menjadi hal yang krusial. Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat dapat menghambat realisasi program-program unggulan Gubernur terpilih. Namun, dengan optimalisasi PAD, efisiensi operasional, dan kolaborasi dengan stakeholders, Pemerintah Provinsi NTB dapat meminimalkan dampak negatifnya. Hal ini memerlukan langkah-langkah strategis seperti diversifikasi sumber pendanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Pembangunan NTB harus berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Program-program seperti mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan adaptasi perubahan iklim perlu mendapatkan alokasi anggaran yang memadai. Selain itu, pembangunan harus inklusif, memastikan bahwa semua wilayah, baik Lombok maupun Sumbawa, mendapatkan manfaat yang merata. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan meliputi optimalisasi PAD melalui peningkatan pemungutan pajak dan retribusi, efisiensi operasional dengan mengurangi biaya administrasi, kolaborasi dengan stakeholders, peningkatan kapasitas SDM aparatur, dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

Prioritas utama Pemerintah Provinsi NTB adalah mengimplementasikan pengelolaan aset daerah berbasis wilayah dan penguatan PAD sebagai solusi jangka pendek-menengah yang konkret. Kedua kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga mendorong pembangunan inklusif sesuai visi NTB Makmur Mendunia. Untuk kebijakan

dengan skor lebih rendah, diperlukan kajian lebih mendalam atau pilot project sebelum diadopsi secara luas.

## 5. Daftar Pustaka

- Austin, A., Favril, L., Craft, S., Thliveri, P., & Freeman, T. P. (2023). Factors associated with drug use in prison: A systematic review of quantitative and qualitative evidence. *International Journal of Drug Policy*, 122, 104248. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104248>
- Azzawagama Firdaus, A., Yudhana, A., & Riadi, I. (2024). Prediction of Indonesian Presidential Election Results using Sentiment Analysis with Naïve Bayes Method. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 8(1), 41–50. <https://doi.org/10.30865/mib.v8i1.7007>
- Bohorquez, N. G., Malatzky, C., McPhail, S. M., Mitchell, R., Lim, M. H. A., & Kularatna, S. (2024). Attribute Development in Health-Related Discrete Choice Experiments: A Systematic Review of Qualitative Methods and Techniques to Inform Quantitative Instruments. *Value in Health*, 27(11), 1620–1633. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2024.05.014>
- Chopra, A., Shastry, S., Mohan, G., Chenna, D., & Rajendran, V. (2025). A Comprehensive SWOT and TOWS analysis of transfusion medicine: Indian Perspective. *Transfusion and Apheresis Science*, 64(1), 104061. <https://doi.org/10.1016/j.transci.2024.104061>
- Firdaus, A. A., Yudhana, A., & Riadi, I. (2023a). DECODE : Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi. *Decode: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 3(2), 236–245. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51454/decode.v3i2.172>
- Firdaus, A. A., Yudhana, A., & Riadi, I. (2023b). Public Opinion Analysis of Presidential Candidate Using Naïve Bayes Method. *Kinetik: Game Technology, Information System, Computer Network, Computing, Electronics, and Control*, 4(2), 563–570. <https://doi.org/10.22219/kinetik.v8i2.1686>
- Firdaus, A. A., Yudhana, A., & Riadi, I. (2024). *Prediction of Presidential Election Results using Sentiment Analysis with Pre and Post Candidate Registration Data*.
- Khosravani, F., Abbasi, E., Choobchian, S., & Jalili Ghazizade, M. (2025). Optimizing food waste management in Tehran: A SWOT analysis and strategic recommendations. *Heliyon*, 11(4), e42474. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e42474>
- Kumar, L., Sleiti, A. K., & Al-Ammari, W. A. (2025). A techno-economic evaluation and SWOT analysis of various hydrogen energy carriers: Production to distribution. *International Journal of Hydrogen Energy*. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2025.03.125>
- Monteiro-Alves, P. S., Captivo Lourenço, E., Ornellas Meire, R., & Godoy Bergallo, H. (2024). Is banning Persistent Organic Pollutants efficient? A quantitative and qualitative systematic review in bats. *Perspectives in Ecology and Conservation*, 22(3), 250–259. <https://doi.org/10.1016/j.pecon.2024.07.001>

Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MEDAN. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

Nurcahya Avianty, D., Hidayat Jatmika, A., & Miftahul Ulum, L. (2020). *SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET PADA BPKAD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BERBASIS WEBSITE DENGAN FRAMEWORK LARAVEL*. <http://begawe.unram.ac.id/index.php/JBTI/>

Tahirs, J. P. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2017-2018. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 3(1), 25. <https://doi.org/10.35914/jemma.v3i1.329>

Tüzün, A., Tripathi, S., Bachmann, N., Thienemann, A.-K., Brunner, M., & Jodlbauer, H. (2025). Granular and Relational SWOT Analysis: An Ontological Approach. *Procedia Computer Science*, 253, 2575–2585. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.01.317>

Vercasson, A., Gaucel, S., Guillard, V., & Angellier-Coussy, H. (2025). An overview of methods to qualitatively and quantitatively characterize the structure of polymer-coated cardboards: Advantages and limitations. *Materials & Design*, 113735. <https://doi.org/10.1016/j.matdes.2025.113735>

Verlicchi, P., Lacasa, E., & Grillini, V. (2023). Quantitative and qualitative approaches for CEC prioritization when reusing reclaimed water for irrigation needs – A critical review. *Science of The Total Environment*, 900, 165735. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165735>

Waheed, A., Kousar, S., Khan, M. I., & Fischer, T. B. (2025). Expert perceptions on CPEC sustainability appraisal: SWOT analysis for informed policy decisions. *Environmental Science & Policy*, 164, 104009. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104009>